



PEMERINTAH KOTA MEDAN

L K P J

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
2021

TAHUN ANGGARAN
2022

DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Maha Esa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Kota Medan tahun anggaran 2021 dapat disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Sesuai pedoman tersebut LKPJ berisi informasi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang dilengkapi dengan capaian kinerja daerah sebagai tolak ukur atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Pendidikan Kota Medan telah menjalankan kewenangan kegiatannya sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Kota Medan ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang. Semoga dengan disusunnya laporan ini dapat memberikan manfaat yang berharga bagi pihak yang berkepentingan.

Demikian, atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Kota Medan ini diucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2022

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

**LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP.
PEMBINA
NIP. 19750228 200604 1 015**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
1.3. Data Umum Daerah.....	2
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	3
Uraian Perubahan terhadap kegiatan dan alokasi anggaran terkait pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan	3
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	4
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	4
1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	4
2. Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan setiap urusan pemerintahan	5
3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	6
3.1.1. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada urusan pemerintah/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintah sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	7
3.1.2. Kesesuaian realisasi Program dan Kegiatan	8
3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan	40
3.3. Tindak lanjut rekomendasi	40
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	41
4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan	41
4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintah yang diterima dari tingkat atasnya	43
4.1.2. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintah yang diterima dari tingkat bawahnya	43
4.2. Hambatan dan Permasalahan	43
BAB V PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Medan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Medan selaku Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan untuk bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPJ kepada DPRD, LPPD Kepada Pemerintah dan ILPPD Kepada Masyarakat.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi Wali Kota Medan dan **Wakil Wali Kota Medan** terpilih ditetapkan sebagai **visi misi** pembangunan jangka menengah daerah tahun **2021-2026** yakni ***Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif.***

1.3. Data Umum Daerah

- a. Data Geografis Wilayah
- b. Jumlah Penduduk
- c. Pertumbuhan Penduduk
- d. Jumlah PNS
- e. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan
- f. Realisasi belanja menurut jenis belanja
- g. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

**Dilengkapi data oleh TIM LKPJ
Pemko**

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Dilengkapi data oleh TIM LKPJ
Pemko

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni Sekolah (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	87,25%	65,19%	74,72%
2	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	APK SD/MI/Paket A	100%	109,36%	109,36%
		APM SD/MI/Paket A	100%	89,70%	89,70%
		APK SMP/MTs/SMPT/ Paket B	100%	118,67%	118,67%
		APM SMP/MTs/SMPT/ Paket B	100%	81,86%	81,86%
3	Menurunnya Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar	Angka Putus Sekolah (APS)/SD/MI	0,08%	0,71%	11,34%
		Angka Putus Sekolah (APS)/SMP/MTs	0,06%	1,01%	5,96%
4	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana satuan pendidikan	Persentase Ruang kelas Baik SD	83%	70,74%	85,23%
		Persentase Ruang kelas Baik SMP	83%	82,63%	99,56%

5	Meningkatnya Kualitas Lulusan (AL) SD/MI/Paket A Dasar, SMP/MTs/Paket B	Angka Lulusan (AL) SD/MI/Paket A	100%	112,15%	112,15%
		Angka Lulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	100%	100%	100%
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MTs	100%	126,18%	126,18%

2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	760.504.919.739,-	667.569.327.748,-	87,78%
	Program Pengelolaan Pendidikan	183.734.742.444,-	171.081.177.100,-	93,11%
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	102.704.638.346,-	101.544.462.955	98,87%
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	50.952.351.998,-	49.065.152.645,-	96,30%
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia	21.737.271.600,-	13.591.318.850,-	62,53%
4	Pengelolaan Pendidikan	8.340.480.500,-	6.880.242.650,-	82,49%
	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	946.706.400,-	0	0%
	TOTAL	945.186.368.583,-	838.650.504.848	88,73%

3. **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Untuk melihat persentase capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI (%)	KET
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	11	98,87%	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10	96,30%	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4	62,53%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	82,49%	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	0,00%	
		Jumlah	30	91,00%	

PERHITUNGAN

		Nilai Capaian Program dalam Tapkin
<u>Perhitungan :</u>		
<i>Analisis kesesuaian antar program dalam perjanjian kinerja</i>	25,48113769	91,00%
	30	

3.1.1. Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintah/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintah sesuai dengan target dalam dokumen anggaran.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBUJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2020	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					100%	93,11%	-	-	-		
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					100%	98,87%			
						Pengadaan Perlengkapan Siswa					100%	91,09%	-	-	
						Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah					100%	91,09%	-	-	-
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas					100%	99,22%	-	-	-
						Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah					100%	99,22%	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100%	97,86%	-	-	-
							Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan SD	100%	98,65%	-	-	-
							Pengadaan Peralatan Penjaskes SD	100%	96,89%	-	-	-
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100%	70,99%			
							Lomba Cerdas Cermat Siswa Tingkat SD	100%	63,41%	-	-	-
							Pemetaan Potensi Siswa Tingkat SD	100%	79,91%	-	-	-
							Pengadaan Mebel Sekolah	100%	99,40%			
							Meubelair SD	100%	99,40%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah		100%	0,00%	Pergeseran Anggaran Kegiatan untuk Anggaran DAK Fisik	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 202	-
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100%	0,00%	-			
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100%	35,66%	-	-	-
							Pendataan dan Pelaporan Aset Persekolahan Tingkat SD Negeri Se-Kota Medan	100%	35,66%	-	-	-
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		100%	100,00 %	-	-	-
							Dana BOS SD	100%	100,00 %	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	14,95%	-	-	-
							Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi	100%	14,95%	-	-	-
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	52,00%	-	-	-
							Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi tingkat SD dan SMP	100%	89,98%	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Bimbingan Teknis Inovasi Pembelajaran Berbasis Merdeka Belajar tingkat SD	100%	55,49%	-	-	-
							Workshop Assesment Kompetensi Minimum dan Survey Karakter Tingkat SD	100%	75,38%	-	-	-
							Workshop Penguatan Kurikulum Muatan Lokal	100%	0,00%	Kegiatan Tidak dilaksanakan disebabkan pandemic sehingga dilarang mengumpulkan masa di TW 2	Akan diusullkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Workshop TIM Pengembangan Kurikulum SD	100%	0,00%	Kegiatan Tidak dilaksanakan disebabkan pandemic sehingga dilarang mengumpulkan masa di TW 2	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100%	96,65%	-	-	-
							Tata Kelola Dana BOS Sekolah Dasar	100%	96,65%	-	-	-
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	96,30%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Pengadaan Perlengkapan Siswa	100%	91,81%			
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin SMP	100%	91,81%	-	-	-
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100%	97,25%			
							Pengadaan peralatan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP	100%	97,25%	-	-	-
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100%	54,23%	-	-	-
							Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP	100%	0,00%	Pergeseran Anggaran Kegiatan untuk Anggaran DAK Fisik	Akan diusulkan kembali pada anggaran Tahun 2022	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Lomba Cerdas Cermat Siswa Tingkat SMP	100%	78,18%	-	-	-
							Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	100%	0,00%	Pergeseran Anggaran Kegiatan untuk Anggaran DAK Fisik	Akan diusullkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-
							Pemetaan Potensi Siswa Tingkat SMP	100%	79,91%	-	-	-
							Pengadaan Mebel Sekolah	100%	99,22%			
							Pengadaan Meubiler SMP	100%	99,22%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah		100%	99,96%			
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Infocus)	100%	99,96%	-	-	-
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100%	70,66%	-	-	-
							Pendataan dan Pelaporan Aset Persekolahan Tingkat SMP	100%	70,66%	-	-	-
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		100%	100,%	-	-	-
							Dana BOS SMP	100%	100,%			
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100%	29,52%			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Bimbingan Teknis Aplikasi e-Raport K 13 Tingkat SMP	100%	95,07%	-	-	-
							Bimbingan Teknis Inovasi Pembelajaran Berbasis Merdeka belajar Tingkat SMP	100%	69,98%	-	-	-
							Tata Kelola Dana BOS SMP	100%	92,31%	-	-	-
							Workshop Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Tingkat SMP	100%	0,00%	Kegiatan Tidak dilaksanakan disebabkan pandemic sehingga dilarang mengumpulkan masa di TW 2	Akan diusullkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		100%	47,40%		-	-
							Monitoring Kelembagaan kota Medan Tahun 2021	100%	0,00%	Tidak dilaksanakan disebabkan waktu tidak sesuai dengan target yang direncanakan	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-
							Monitoring Proses Pembelajaran Kota Medan Tahun 2021	100%	0,00%	Tidak dilaksanakan disebabkan waktu tidak sesuai dengan target yang direncanakan	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Monitoring TPPMPD Kota Medan Tahun 2021	100%	0,00%	Tidak dilaksanakan disebabkan waktu tidak sesuai dengan target yang direncanakan	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-
							Sosialisasi Dana BOS SMP	100%	74,14%	-	-	-
							TIM Manajemen BOS	100%	71,72%	-	-	-
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		100%	26,64%	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Aplikasi Pembelajaran Online	100%	0,00%	Kegiatan tidak dilaksanakan karena nama kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan seharusnya Pemeliharaan Aplikasi Pembelajaran Online.	Akan diusulkan kembali sesuai target kegiatan pada Anggaran Tahun 2022	-
							Layanan Aplikasi PPDB Online	100%	86,21%	-	-	-
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		100%	62,53%	-	-	-
						Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		100%	97,31%	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Pengadaan Perlengkapan Dasar Buku Gambar dan Alat Mewarnai	100%	97,31%	-	-	-
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		100%	74,81%	-	-	-
							Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD	100%	79,59%	-	-	-
							Operasional TK Negeri dan Satuan Pendidikan Non formalSKB Medan	100%	74,07%	-	-	-
							Pemberian makan Tambahan	100%	71,05%	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		100%	0,00%	-	-	-
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100%	0,00%	Pergeseran Anggaran P APBD	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		100%	61,76%	-	-	-
							Biaya Operasional Manajemen Biaya Operasional PAUD	100%	0,00%	Kegiatan Tidak dilaksanakan disebabkan pandemic sehingga dilarang mengumpulkan masa di TW 2	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Biaya Operasional Penyelenggara PAUD	100%	62,53%	-	-	-
							Monitoring dan Supervisi BOP PAUD	100%	62,58%	-	-	-
							Monitoring Pelaksanaan K 13 di Pendidikan Satuan PAUD	100%	34,64%	-	-	-
							Pelatihan Character Building bagi Guru PAUD	100%	0,00%	Tidak dilaksanakan disebabkan pandemic sehingga dilarang mengumpulkan masa di TW 2	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Pelatihan Implementasi K 13 di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	79,88%	-	-	-
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			100%	82,49%	-	-	-
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		100%	83,79%	-	-	-
						Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		100%	83,79%	-	-	-
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%	0,00%	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	0,00%	Pergeseran Anggaran P APBD	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	53,50%	-	-	-
							Biimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan	100%	77,04%	-	-	-
							Monitoring Pelaksanaan K 13 di Pendidikan Kesetaraan Paket C	100%	6,74%	-	-	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
							Pelatihan Implementasi K 13 Pendidikan Kesetaraan	100%	59,98%	-	-	-
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				100%				
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100%		-	-	-
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%		-	-	-
							Analisis Kebutuhan Guru SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Medan	100%	0,00%	Kegiatan Tidak dilaksanakan disebabkan pandemic sehingga dilarang mengumpulkan masa di TW 2	Akan diusulkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%		-	-	-
							Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Jenjang SD dan SMP	100%	0,00%	Kegiatan Tidak dilaksanakan disebabkan penyusunan jadwal tidak sesuai dengan target anggaran, sehingga dilaksanakan ke tahun 2022	Akan diusullkan kembali pada Anggaran Tahun 2022	-

Realisasi Program dan Kegiatan

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pagu Rp760.504.919.739,- (*Tujuh ratus enam puluh milyar lima ratus empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dengan realisasi Rp667.569.327.748,- (*Enam ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*) atau 87,78%. Terdiri dari :

1.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah pagu Rp857.483.320.- dan terealisasi sebesar Rp291.988.750.- atau 34,05%. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain :

1.1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan jumlah pagu Rp349.273.800.- dan terealisasi sebesar Rp215.064.000,- atau 61,57%. Rincian kegiatan ini antara lain :

1.1.1.1.1. Pendataan Persekolahan dengan jumlah pagu Rp119.595.600.- dan terealisasi sebesar Rp15.237.800,- atau 12,74%. Penurunan realisasi anggaran disebabkan penggunaan biaya yang disesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaannya yaitu untuk penggandaan dokumen.

1.1.1.1.2. Penyusunan Kalender Pendidikan dengan jumlah pagu Rp30.301.600,- dan terealisasi sebesar Rp19.839.700 atau 65,47%. Penurunan realisasi disesuaikan jumlah kebutuhan dan efisiensi biaya berdasarkan jumlah kalender pendidikan yang di cetak.

1.1.1.1.3. Penyusunan Profill Pendidikan dengan jumlah pagu Rp42.709.100,- dan terealisasi sebesar Rp25.128.500 atau 58,84%. Penurunan realisasi disebabkan penggunaan anggaran yang tidak dimaksimalkan karena tidak semua anggaran yang tersedia direalisasi hal ini mengingat kebutuhan yang disesuaikan.

1.1.1.1.4. Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan dengan jumlah pagu Rp156.667.500.- dan terealisasi sebesar Rp154.858.000 atau 98,85%.

1.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan jumlah pagu Rp46.362.200.- dan terealisasi sebesar Rp0.- atau 0%. Rincian kegiatan ini antara lain :

1.1.1.2.1. Pengukuran Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan jumlah pagu Rp32.685.200 dan anggaran tidak direalisasikan karena telah di manfaatkan melalui penggandaan dokumen dan untuk menghindari double cost dan Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 tersedia 100%.

1.1.1.2.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiinerja SKPD dengan jumlah pagu Rp13.677.000 dan anggaran tidak direalisasikan karena telah di manfaatkan melalui penggandaan dokumen dan untuk menghindari double cost. Dokumen Laporan Capaian Kinerja Anggaran (LKJ, LKPJ tahun 2021) tersedia 100%.

- 1.1.1.3.** Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan jumlah pagu Rp283.551.320.- dan terealisasi sebesar Rp76.924.750.- atau 27,13%. Rincian kegiatan ini yaitu :
- 1.1.1.3.1.** Evaluasi Kinerja Sarana Prasarana Sekolah Negeri dengan jumlah pagu Rp111.794.720 dan Tidak terealisasi akibat pandemic sehingga dilarang mengumpulkan masa di TW 2.
- 1.1.1.3.2.** Pelaksanaan Forum OPD dengan jumlah pagu Rp27.153.200,- dan terealisasi sebesar Rp13.178.250 atau 48,53%. Penurunan realisasi ini disebabkan penyesuaian kebutuhan anggaran yang dilaksanakan dan pada masa pandemic sehingga jumlah peserta dibatasi.
- 1.1.1.3.3.** Penyusunan Renja OPD dengan jumlah pagu Rp45.460.100 dan terealisasi sebesar Rp42.469.500 atau 93,42%.
- 1.1.1.3.4.** Penyusunan Renstra dengan jumlah pagu Rp99.143.300 dan terealisasi sebesar Rp21.277.000 atau 21,46%. Penurunan realisasi ini disebabkan tidak semua anggaran dimanfaatkan seperti dalam kerjasama dengan tim ahli dalam penyusunan renstra sehingga anggaran tidak maksimal.
- 1.1.1.4.** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah pagu Rp178.296.000.- dan tidak terealisasi disebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.
- 1.1.1.5.** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah pagu Rp754.630.621.465.- dan terealisasi sebesar Rp663.594.350.082.- atau 87,94%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- 1.1.1.6.** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah pagu Rp690.937.393.822.- dan terealisasi sebesar Rp602.403.663.9820.- atau 87,19%.
- 1.1.1.7.** Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bantuan Guru dengan jumlah pagu Rp63.693.227.643.- dan terealisasi sebesar Rp61.314.286.100.- atau 96,27%.
- 1.1.1.8.** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Tagihan Listrik,Air dan Internet) dengan jumlah pagu Rp768.208.900.- dan terealisasi sebesar Rp507.925.797.- atau 66,12%. Kurangnya maksimal penggunaan anggaran ini karena efesiensi kebutuhan baik air, dan internet sehingga mengurangi anggaran yang disediakan.
- 1.1.1.9.** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah pagu Rp469.502.300.- dan terealisasi sebesar Rp102.417.100.- atau 20,63%. Rincian kegiatan ini antara lain :
- 1.1.1.10.** Aplikasi Pendataan Guru Honorer dengan jumlah pagu Rp181.733.400.- dan Tidak dilaksanakan disebabkan proses penganggarannya dilakukan pada P-APBD sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 1.1.1.11.** Pembuatan Aplikasi Kepegawaian dengan jumlah pagu Rp152.948.900.- dan Tidak dilaksanakan disebabkan proses penganggarannya dilakukan pada P-APBD sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

- 1.1.1.12.** Pembuatan Website Dinas Pendidikan dengan jumlah pagu Rp119.800.000.- dan terealisasi sebesar Rp63.899.100.- atau 53,34%. Penurunan realisasi disebabkan tidak dipenuhi belanja modal dalam penyediaan peralatan komputer tergolong server sehingga penggunaan anggaran tidak maksimal.
- 1.1.1.13.** Perayaan Hari Besar Nasional dengan jumlah pagu Rp42.020.000.- dan terealisasi sebesar Rp38.518.000.- atau 91,67%.
- 1.1.1.14.** Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan dengan jumlah pagu Rp1.219.559.670.- dan terealisasi sebesar Rp904.463.280.- atau 74,16%. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1.1.1.15.** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah pagu Rp166.070.000.- dan terealisasi sebesar Rp17.969.050.- atau 10,82%. Penurunan realisasi ini disebabkan situasi Covid-19 , kegiatan lebih di fokuskan secara daring, ini mengakibatkan terjadinya penurunan daya serap dari anggaran.
- 1.1.1.16.** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah pagu Rp25.881.100.- dan terealisasi sebesar Rp24.929.000.- atau 96,32%.

- 1.1.1.17.** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah pagu Rp551.352.400.- dan terealisasi sebesar Rp488.414.400.- atau 88,58%.
- 1.1.1.18.** Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan jumlah pagu Rp296.974.370.- dan terealisasi sebesar Rp248.847.930.- atau 83,79%.
- 1.1.1.19.** Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah pagu Rp106.245.800.- dan terealisasi sebesar Rp54.302.500.- atau 51,11%. Penurunan realisasi dikarenakan penyesuaian kebutuhan dalam penyediaan peralatan rumah tangga di kantor.
- 1.1.1.20.** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan jumlah pagu Rp73.036.000.- dan terealisasi sebesar Rp70.000.400.- atau 95,84%.
- 1.1.2.** Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah pagu Rp1.239.663.400.- dan terealisasi sebesar Rp940.201.000.- atau 75,84%. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- 1.1.2.1.** Pengadaan Mebel dengan jumlah pagu Rp438.233.800.- dan terealisasi sebesar Rp421.841.000.- atau 96,26%.
- 1.1.2.2.** Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah pagu Rp801.429.600.- dan terealisasi sebesar Rp518.360.000.- atau 64,68%. Penurunan realisasi tidak terpenuhi penyediaan peralatan Server aplikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga proses penyediaanya di tunda.

1.1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PHL) dengan jumlah pagu Rp839.126.484.- dan terealisasi sebesar Rp836.629.089.- atau 99,70%.

1.1.4. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah pagu Rp453.754.200.- dan terealisasi sebesar Rp391.352.650.- atau 86,25%. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

1.1.4.1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah pagu Rp152.633.000.- dan terealisasi sebesar 118.754.600.- atau 77,80%

1.1.4.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah pagu Rp18.142.400.- dan terealisasi sebesar 7.816.000.- atau 43,08%

1.1.4.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dengan jumlah pagu Rp200.000.000.- dan terealisasi sebesar 198.750.000.- atau 99,38%

1.1.4.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah pagu Rp82.978.800.- dan terealisasi sebesar 66.032.050.- atau 79,58%.

1.2. Program Pengelolaan Pendidikan dengan jumlah pagu Rp183.734.742.444;- (*Seratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat dua juta empat ratus empat puluh empat rupiah*) dengan realisasi Rp171.081.177.100,- (*Seratus tujuh puluh satu milyar delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah*) atau 93,11%

1.2.1. Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar dengan jumlah pagu Rp102.704.638.346.- dan terealisasi sebesar Rp101.544.462.955,- atau 98,87%. Kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

1.2.1.1. Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan jumlah pagu Rp3.114.591.100.- dan terealisasi sebesar Rp2.837.212.380,- atau 91,09%.

1.2.1.2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan jumlah pagu Rp3.673.224.200.- dan terealisasi sebesar Rp3.644.564.000,- atau 99,22%.

1.2.1.3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan jumlah pagu Rp2.332.336.200.- dan terealisasi sebesar Rp2.282.336.025,- atau 98,87%.

1.2.1.4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan jumlah pagu Rp209.962.296.- dan terealisasi sebesar Rp149.059.500,- atau 98,87%.

1.2.1.5. Pengadaan Mebel Sekolah dengan jumlah pagu Rp4.037.668.100.- dan terealisasi sebesar Rp4.013.370.750,- atau 99,40%.

1.2.1.6. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan jumlah pagu Rp0.- dan tidak terlaksana disebabkan terkoreksi atau refocusing dari pengalihan ke anggaran DAK Fisik yang harus di kembalikan.

1.2.1.7. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan jumlah pagu Rp93.402.200.- dan terealisasi sebesar Rp101.544.462.955,- atau 98,87%.

- 1.2.1.8.** Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan jumlah pagu Rp87.766.362.800.- dan terealisasi sebesar Rp87.766.362.800,- atau 100%.
- 1.2.1.9.** Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan jumlah pagu Rp76.942.800.- dan terealisasi sebesar Rp11.501.500,- atau 14,95%. Penurunan realisasi ini dikarenakan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan dan efisiensi sehingga anggaran tidak maksimal.
- 1.2.1.10.** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan jumlah pagu Rp1.223.849.500.- dan terealisasi sebesar Rp636.356.650,- atau 52,00%. Penurunan realisasi ini disebabkan kondisi pandemic sehingga 2 kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- 1.2.1.11.** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan jumlah pagu Rp176.299.150.- dan terealisasi sebesar Rp170.393.550,- atau 96,65%.
- 1.2.2.** Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah pagu Rp50.952.351.998,- dan terealisasi sebesar Rp49.065.152.645,- atau 96,30%. kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1.2.2.1.** Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan jumlah pagu Rp3.100.629.480.- dan terealisasi sebesar Rp2.846.756.480,- atau 91,81%.

- 1.2.2.2.** Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan jumlah pagu Rp951.699.800.- dan terealisasi sebesar Rp925.532.500,- atau 97,25%.
- 1.2.2.3.** Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan jumlah pagu Rp309.862.896.- dan terealisasi sebesar Rp168.040.500,- atau 54,25%. Penurunan realisasi ini disebabkan Tidak dapat dilaksanakan karena jadwal kegiatan dari pusat tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran APBD.
- 1.2.2.4.** Pengadaan Mebel Sekolah dengan jumlah pagu Rp1.409.857.600.- dan terealisasi sebesar Rp1.398.831.515,- atau 99,22%.
- 1.2.2.5.** Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan jumlah pagu Rp3.057.750.000.- dan terealisasi sebesar Rp3.056.504.400,- atau 99,96%.
- 1.2.2.6.** Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan jumlah pagu Rp41.263.900.- dan terealisasi sebesar Rp29.158.100,- atau 70,66%. Penurunan realisasi disebabkan tidak maksimalnya proses Pendataan dan Pelaporan Aset Persekolahan Tingkat SD Negeri Se-Kota Medan karena kondisi pandemic sehingga berpengaruh dengan jumlah anggaran yang digunakan.
- 1.2.2.7.** Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah pagu Rp39.892.837.200.- dan terealisasi sebesar Rp39.892.837.200,- atau 100%.

- 1.2.2.8.** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah pagu Rp1.117.629.090.- dan terealisasi sebesar Rp329.897.450,- atau 29,52%. Penurunan realisasi disebabkan tidak maksimalnya kegiatan yang dilaksanakan karena kondisi pandemic sehingga jumlah peserta dibatasi dan ini berpengaruh dengan jumlah anggaran yang digunakan.
- 1.2.2.9.** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan jumlah pagu Rp637.293.750.- dan terealisasi sebesar Rp302.097.500,- atau 47,40%. Penurunan realisasi ini disebabkan kondisi pandemic sehingga 4 kegiatan Monitoring tidak dapat dilaksanakan.
- 1.2.2.10.** Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan jumlah pagu Rp433.528.282.- dan terealisasi sebesar Rp115.497.000,- atau 26,64%. Kegiatan tidak dilaksanakan karena nama kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang seharusnya Pemeliharaan Aplikasi Pembelajaran Online.
- 1.2.3.** Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jumlah pagu Rp21.737.271.600.- dan terealisasi sebesar Rp13.591.318.850.- atau 62,53%. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1.2.3.1.** Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD dengan jumlah pagu Rp151.914.200.- dan terealisasi sebesar Rp147.831.400.- atau 97,31%.

- 1.2.3.2.** Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dengan jumlah pagu Rp859.998.000.- dan terealisasi sebesar Rp643.366.250.- atau 74,81%.
- 1.2.3.3.** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dengan jumlah pagu Rp0.- dan tidak terlaksana disebabkan terkoreksi atau refocusing dari pengalihan ke anggaran DAK Fisik yang harus di kembalikan.
- 1.2.3.4.** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan jumlah pagu Rp20.725.359.400.- dan terealisasi sebesar Rp12.800.121.200.- atau 61,76%. Penurunan ini disebabkan 1 kegiatan tidak terlaksana dikarenakan pengumpulan massa dengan para orang tua dimasa pandemic.
- 1.2.4.** Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan dengan jumlah pagu Rp8.340.480.500.- dan terealisasi sebesar Rp6.880.242.650.- atau 82,49%. Kegiatan Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1.2.4.1.** Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan dengan jumlah pagu Rp7.983.192.700.- dan terealisasi sebesar Rp6.689.085.000.- atau 83,79%.
- 1.2.4.2.** Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan jumlah pagu Rp0.- dan terealisasi sebesar Rp0.- atau 0%. tidak terlaksana disebabkan terkoreksi atau refocusing dari pengalihan ke anggaran DAK Fisik yang harus di kembalikan.

- 1.2.4.3.** Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan jumlah pagu Rp357.287.800.- dan terealisasi sebesar Rp191.157.650.- atau 53,50%. Penurunan realisasi ini disebabkan kondisi pandemic sehingga kegiatan Monitoring tidak maksimal.
- 1.3.** Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah pagu Rp946.706.400,- (*Sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus rupiah*) tidak terlaksana.
- 1.3.1.** Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan jumlah pagu Rp21.740.000,- dengan tidak terlaksana disebabkan proses simulasi data terhambat pada kondisi pandemic.
- 1.3.2.** Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan jumlah pagu Rp924.966.400,- dengan Tidak dilaksanakan disebabkan proses penganggarannya dilakukan pada P-APBD sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut (Diklat Calon Kepala Sekolah) yang memiliki proses pelaksanaan membutuhkan waktu 9 bulan.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan (Bappeda)

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyesuaian penyusunan Nomenklatur Anggaran	Permendagri no. 90 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Penyesuaian Anggaran berdasarkan Sub Kegiatan yang menjadi capaian anggaran
2	Pembelajaran Jarak jauh <i>daring</i> dan dapat dimungkinkan proses tatap muka.	Perwal nomor 27 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Covid 19	Memberikan pembatasan kepada satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh.
3	SPM Pendidikan	Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
4	Perubahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Mengoptimalkan kebutuhan layanan SPM pada pada satuan pendidikan dengan menentukan target dalam capaian kinerja.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2021 (Seluruh OPD)d

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penambahan anggaran Tenaga Pendidik P3K sengan kuota 2267 orang untuk tahun 2021	Telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 melalui Perda R-APBD 2022	Menyediakan dan mangalokasi kebutuhan tenaga pendidik di satuan pendidikan khususnya pada pendidikan dasar.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PERBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan Pembantuan

Berdasar amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Latar belakang penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, dan tidak mungkin semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah

Penyelenggaraan atas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada OPD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selanjutnya tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat dibawahnya.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan mendapatkan Program yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk tugas pembantuan. Program / Kegiatan, jumlah anggaran serta realisasinya, Perangkat Daerah yang melaksanakan, dengan uraian sebagai berikut :

No.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Penyaluran Bantuan Operasional Kelembaga PAUD 749 lembaga jumlah peserta Didik 24258 orang	20.020.800.000
2			Penyaluran Bantuan Dana Literasi Dasar dalam penyediaan layanan Pojok baca di 10 PAUD	30.000.000
3			Bimbingan Teknis Penjaminan Mutu PAUD 2021	35.000.000
4			penyelenggaraan Bimtek Lingkungan Belajar Berkualitas PAUD 30 orang	45.000.000
5		Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan	7.978.400.000
6	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD(Sertifikasi Guru)	215.342.922.606
7			Dana Tambahan Penghasilan PNSD Fungsional	1.000.000.000

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.

a. Hambatan :

- Jumlah anggaran yang diterima di daerah tidak sesuai dengan data distribusi yang akan diserahkan kepada para tenaga pendidik dalam kaitannya dengan Sertifikasi. Dengan kata lain proses informasi untuk pembayaran kepada tenaga pendidik berdasarkan SK Dirjen sebagai dasar diberikan dana tidak sesuai dengan jadwal.
- Pada Triwulan IV diharapkan tidak ada lagi muncul rekomendasi pemabayaran Tunjangan sertifikasi untuk tenaga pendidikan untuk bulan desember.
- Pada Bantuan BOP PAUD mengalami pengurangan dari jumlah anggaran sehingga berpengaruh kepada penyaluran dana ke lembaga PAUD.
- Perlu di tinjau jumlah Lembaga Taman Kanak-kanak yang masih minim dan perlu untuk di sesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada pada daerah yang padat.

b. Permasalahan :

- Dimohonkan untuk ditambah anggaran untuk TAMSIL tenaga pendidik karena kuota yang tentaukan berdasarkan anggaran belum sesuai dengan data yang tersedia.
- Pembayaran yang dilakukan untuk Dana Tunjangan Sertifikasi diharapkan tidak menimbulkan pengalihan anggaran di tahun selanjutnya (carry over) sehingga tidak mengganggu pelaporan keuangan.

c. Upaya Penyelesaian:

- Melakukan pendataan jumlah tenaga pendidik yang sertifikasi guna peningkatan kebutuhan yang seharusnya dibayarkan.
- Dari hambatan dan permasalahan yang terjadi harus di evaluasi dan monitoring agar mendapat kebutuhan yang akurat terhadap anggaran yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi pembayaran yang tertunda.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaba (LKPJ) Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Medan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun 2016-2021, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan rencana dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan bisa menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan.

Dengan harapan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan bisa menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya.